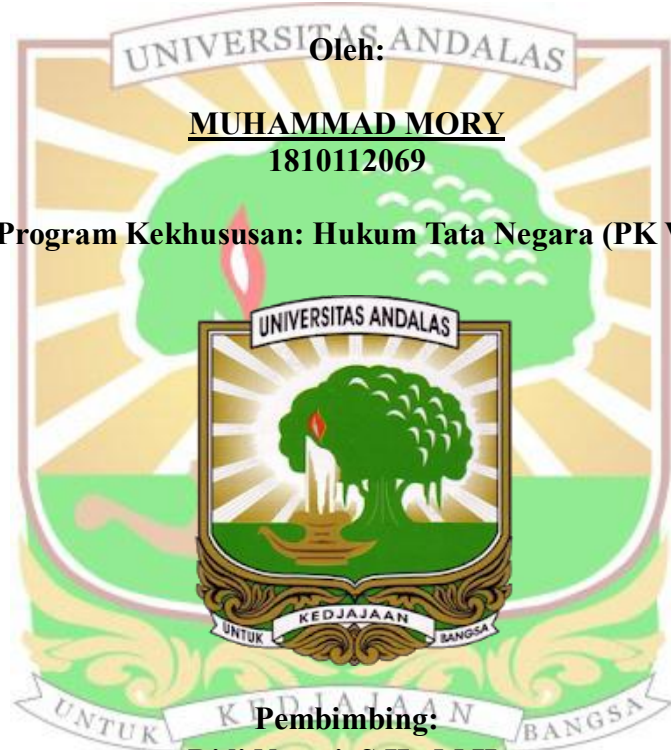


SKRIPSI
IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG PERIODE 2019-2024
TERHADAP PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DALAM
MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

MUHAMMAD MORY

1810112069

Program Kekhususan: Hukum Tata Negara (PK V)

Pembimbing:

Didi Nazmi, S.H., M.H.

Delfina Gusman, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

**IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG PERIODE 2019-2024
TERHADAP PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DALAM
MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE***

(Muhammad Mory, 1810112069, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program
Kekhususan Hukum Tata Negara (PK V), 75 Halaman, Tahun 2023)

ABSTRAK

Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik, Indonesia menganut sistem otonomi daerah, dimana daerah otonom berhak mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya. Penyelenggaraan sistem otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut sebagai DPRD) berperan penting dalam suatu daerah, DPRD adalah lembaga legislatif dan dipilih langsung oleh masyarakat daerah tersebut. Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (selanjutnya disebut sebagai *good governance*) DPRD memiliki fungsi salah satunya fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan DPRD Kota Padang Panjang memiliki peran serta wewenang dalam mewujudkan *good governance* agar seluruh kegiatan pemerintah dan kebijakan pemerintah Kota Padang Panjang dapat terlaksana sesuai yang diinginkan. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yakni: *pertama*, bagaimana implementasi fungsi pengawasan DPRD Kota Padang Panjang periode 2019-2024 terhadap pemerintah Kota Padang Panjang dalam mewujudkan *good governance*; *kedua*, apa saja kendala dan upaya penguatan fungsi pengawasan DPRD Kota Padang Panjang periode 2019-2024 dalam mewujudkan *good governance*. Jenis penelitian dalam skripsi ini ialah jenis penelitian yuridis empiris yakni penelitian hukum mengenai bagaimana implementasi fungsi pengawasan DPRD Kota Padang Panjang terhadap Pemerintah Kota Padang Panjang. Data dikumpulkan dengan cara wawancara secara langsung kepada Anggota DPRD Kota Padang Panjang. Hasil penelitian menjelaskan: *pertama*, Implementasi fungsi pengawasan DPRD Kota Padang Panjang terhadap Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mewujudkan *good governance* telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Padang Panjang dengan cara pengawasan secara langsung dan tidak langsung; *kedua*, kendala dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Kota Padang Panjang merupakan kendala faktor konstituen yang berbeda, upaya penguatan didalam DPRD Kota Padang Panjang yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia DPRD Kota Padang Panjang. Suatu ketegasan DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan agar fungsi pengawasannya dapat terlaksana dengan optimal serta DPRD agar dapat memperbaiki kelemahan yang sedang terjadi.